

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Objek Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 1998). Di Indonesia bank terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan kepemilikan, bank sentral, bank umum, serta bank perkreditan rakyat merupakan jenis bank menurut fungsinya sedangkan bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing merupakan jenis bank menurut kepemilikannya (Sumiartik & Hariasih, 2018). Bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara dinamakan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Sumiartik & Hariasih, 2018). Berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, Bank BUMN adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah atau dengan kata lain kepemilikannya dimiliki oleh negara.

Pada kegiatannya, bank BUMN diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. Kemudian, dalam Undang Undang tersebut juga dijelaskan fungsi dari OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Objek yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bank umum konvensional yang dimiliki oleh negara atau dikenal sebagai bank

BUMN tahun 2015 hingga 2021. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai profil perusahaan dari perusahaan perbankan BUMN.

1.1.1 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Gambar 1.1 Logo Bank BNI

Sumber: www.bni.co.id (2022)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau dikenal sebagai Bank BNI merupakan bank milik negara yang didirikan di Indonesia pada 5 Juli 1946. Pada awal pembentukannya, bank BNI memiliki fungsi sebagai bank sentral dan bank umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 1946. Kemudian, status Bank Negara Indonesia (BNI) berubah menjadi Bank Umum Milik Negara dan ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”. Berdasarkan UU Republik Indonesia No 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 menjelaskan bahwa tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor industri. Pada 29 April Tahun 1992, terdapat perubahan pada bentuk hukum Bank Negara Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun 1997 Bank Negara Indonesia menjadi bank milik pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka dengan cara menawarkan saham kepada masyarakat (Bank Negara Indonesia, 2022).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memiliki visi yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Dalam usaha untuk mencapai visi perusahaan, misi Bank Negara Indonesia adalah memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra

bisnis pilihan utama, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi pegawai sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, dan menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri (BNI, 2022).

1.1.2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Gambar 1.2 Logo Bank Mandiri

Sumber: www.bankmandiri.co.id (2022)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau Bank Mandiri pertama kali dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada awal dibentuknya, Bank Mandiri merupakan bagian dari program pemerintah yaitu restrukturisasi perbankan. Kemudian, tahun 1999 pemerintah menggabungkan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi satu yaitu Bank Mandiri (Bank Mandiri, 2022). Sejak dilakukan penggabungan dengan 4 bank pemerintah maka Bank Mandiri telah menjadi bagian dari Bank BUMN. Berdasarkan *Annual Report* Perusahaan pada tahun 2021, persentase kepemilikan saham bank Mandiri oleh pemerintah sebesar 52%, 31,16% dimiliki oleh Asing, dan 16,83% dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan nasional.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki visi yaitu menjadi partner finansial pilihan utama anda, uraian dari visi tersebut adalah bank mandiri memiliki komitmen dalam membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan serta mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham (Bank Mandiri, 2021). Guna mencapai visi tersebut, maka misi bank mandiri yaitu

menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan *simple* yang menjadi bagian hidup nasabah (Bank Mandiri, 2021).

1.1.3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Gambar 1.3 Logo Bank BRI

Sumber:www.bri.co.id (2022)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada awal dibentuknya, Bank BRI adalah lembaga untuk mengelola dana dari kas masjid yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan nama *De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden*. Kemudian, pada 22 Februari 1946 lembaga tersebut diubah oleh pemerintah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia. Tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia menggabungkan BRI, Bank Tani dan Nelayan, dan *Nederlandsche Handels Maatschappij* menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) namun pada Tahun 1965 pemerintah mengganti kembali BKTN menjadi Bank Rakyat Indonesia dan menetapkannya sebagai bank umum. Status hukum Bank BRI berubah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI, 2021).

Visi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu menjadi *The Most Valuable Banking Group* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion*. Dalam mencapai visinya, misi yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu mengusahakan yang terbaik dengan cara melaksanakan kegiatan perbankan dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik melalui sumber daya manusia yang profesional, dan

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* (BRI, 2021). Berdasarkan Annual Report Perusahaan Tahun 2021, persentase kepemilikan saham Bank BRI yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 53,19% dan 46,81% dimiliki oleh publik.

1.1.4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Gambar 1.4 Logo Bank BTN

Sumber: www.btn.co.id (2022)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau Bank BTN merupakan salah satu perbankan BUMN yang didirikan tahun 1897 saat masa pemerintahan Belanda dengan nama “Postspaarbank”. Kemudian, pada tahun 1942 kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah Jepang dan namanya menjadi “Tyokin Kyoku”. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan Tyokin Kyoku dan merubahnya menjadi “Bank Tabungan Pos RI” lalu tahun 1950 pemerintah Indonesia kembali mengganti nama bank tersebut menjadi “Bank Tabungan Pos” yang merupakan lembaga tabungan di Indonesia. Pada tahun 1963, Pemerintah Indonesia meresmikan penggantian nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos. Kemudian, pada tahun 2009 Bank BTN melakukan penawaran saham kepada umum (Bank Tabungan Negara, 2018).

Visi dari Bank Tabungan Negara adalah menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Negara tahun 2025 dengan misi perusahaan yaitu mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menyediakan rumah yang layak guna mewujudkan impian jutaan rakyat Indonesia, menjadi *home of Indonesia's best talent*, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada

pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan, dan menjadi mitra keuangan bagi pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan (Bank Tabungan Negara, 2018). Berdasarkan Annual Report PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tahun 2021, jumlah saham Bank BTN yang dimiliki oleh pemerintah sebesar 60%, 28,21% dimiliki oleh publik lokal, dan 22,79% dimiliki asing.

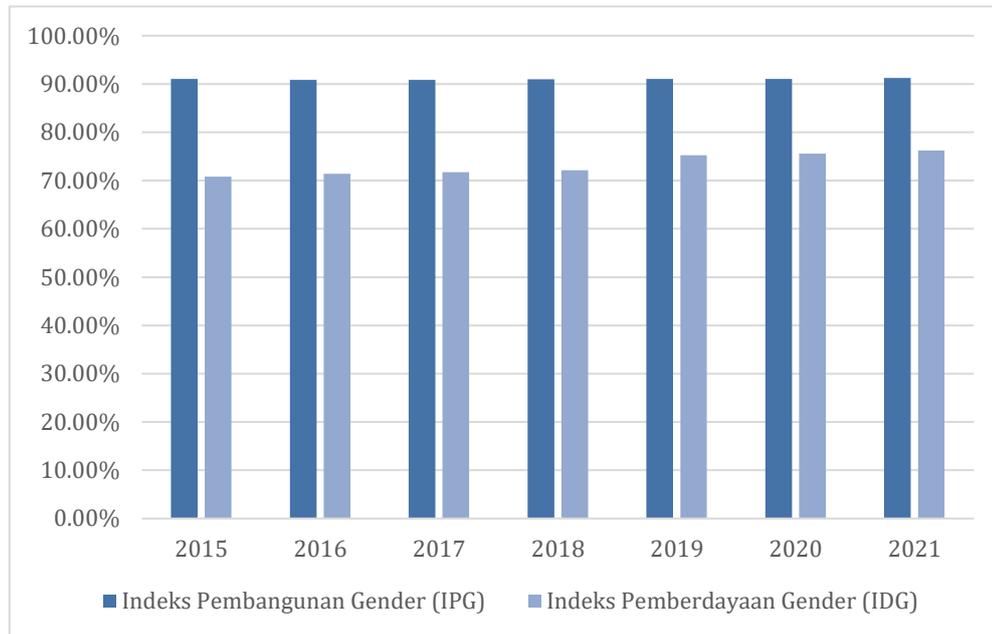
1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada Tahun 2015 dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh 159 kepala negara ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dilaksanakan pada suatu negara. SDGs adalah suatu program yang memiliki tujuan dalam menjaga kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberi jaminan keadilan dan terlaksananya tata kelola sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup di masa sekarang dan masa depan (Bappenas, 2020). Poin kelima pada tujuan SDGS yaitu mengenai kesetaraan gender salah satunya dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin dan mengambil keputusan baik dalam kehidupan, politik, ekonomi, dan masyarakat sehingga tidak hanya laki-laki saja yang memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan eksekutif, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memimpin suatu perusahaan atau menduduki jabatan eksekutif.

Dalam mewujudkan poin kelima program *Sustainable Development Goals*, banyak perusahaan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan eksekutif, salah satunya adalah perusahaan BUMN. Saat ini Bapak Erick Thohir selaku menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menambah kuota kepemimpinan perempuan untuk menduduki posisi komisaris dan direksi yang merupakan upaya dari *check and balance* sehingga diharapkan dapat mencegah risiko korupsi (Tempo.co, 2022). Kemudian, dilansir dari laman Antaranews (2021), Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia mengungkapkan adanya keberagaman gender mampu meningkatkan nilai perusahaan BUMN. Hal ini dikarenakan, wanita dinilai dapat

menjadi penyeimbang perusahaan karena perempuan memiliki rasa empati dan dapat menjadi pendengar yang baik dibandingkan pria (Antaraneews, 2021).

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan



Gender (IDG) di Indonesia Tahun 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.5 menggambarkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di Indonesia pada Tahun 2015 hingga 2021. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu indikator yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan juga politik (Badan Pusat Statistik, 2021). Sedangkan, Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2021). Pada Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan pada IDG dan IPG selama tujuh tahun terakhir meskipun pada Tahun 2016 dan 2020 sempat terjadi penurunan pada IPG. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah perempuan yang menduduki jabatan eksekutif baik pada instansi pemerintahan maupun perusahaan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) menjelaskan bahwa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di Indonesia yaitu indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan

gender dimana dalam hal ini IDG digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi sedangkan IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia menurut gender yang dilihat dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Badan Pusat Statistik (2021) menjelaskan bahwa angka IPG mendekati nilai 100 maka terjadi kesetaraan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dan sebaliknya.

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kesetaraan gender di Indonesia seiring dengan pelaksanaan tujuan SDGs kelima. Meskipun telah terjadi kenaikan tingkat kesetaraan gender di Indonesia, Menurut data pada *World Economic Forum* (2021), Tingkat kesetaraan gender Indonesia menduduki peringkat ke 101 dari 156 negara dengan persentase wanita pada posisi dewan sebesar 10,10%, kepemilikan wanita pada perusahaan sebesar 22,10% dan persentase wanita pada posisi manajemen puncak sebesar 22,10%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih terjadi kesenjangan gender dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dimana persentase pria yang menduduki posisi eksekutif masih jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Ibu Rofikoh Rokhim selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebutkan bahwa tingkat partisipasi kepemimpinan perempuan pada posisi dewan direksi di Perusahaan BUMN hanya sebesar 13% sedangkan pada posisi dewan komisaris hanya sebesar 10% dari jumlah keseluruhan dimana hal ini masih kurang dari target yang diharapkan yaitu sebesar 30% (CNN Indonesia, 2022).

Kinerja perbankan BUMN di Indonesia yang dilihat dari *Return of Assets* (ROA) dalam 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan akibat dari pandemic *Covid-19* (Katadata Media Network, 2021). Hal tersebut dapat diatasi dengan menambah jumlah partisipasi wanita di posisi dewan. Berdasarkan pernyataan dari Bank Dunia, partisipasi wanita berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Katadata Media Network, 2023). Namun, hal ini masih belum terealisasi. Pada sektor jasa keuangan khususnya perbankan, tingkat partisipasi pekerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan

dengan pekerja laki-laki. Pada sistem keuangan global, partisipasi kepemimpinan perempuan juga masih rendah. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (2018), ditemukan bahwa tingkat kepemimpinan perempuan pada pejabat eksekutif di lembaga keuangan khususnya perusahaan perbankan berjumlah kurang dari 2% sedangkan untuk anggota dewan eksekutif hanya sebesar 20%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), persentase partisipasi pekerja perempuan di Indonesia pada sektor jasa keuangan hanya sebesar 1,30% dibandingkan dengan pekerja laki-laki yaitu 1,54%. Salah satu faktor kurangnya partisipasi kepemimpinan perempuan adalah masih kentalnya budaya patriarki pada kehidupan masyarakat dimana perempuan dinilai tidak dapat mengambil keputusan dengan baik karena perempuan diposisikan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Faktor tersebut membuat kepemimpinan perempuan di Indonesia sering dipandang sebelah mata. Pada kenyataannya, Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* (2019), perusahaan dengan jumlah partisipasi kepemimpinan perempuan lebih dari 30% mampu meningkatkan *Return on Asset* (ROA) sebesar 1,4%.

Dalam upaya mencapai target tingkat partisipasi kepemimpinan perempuan, Bapak Erick thohir selaku Menteri BUMN melakukan penambahan kuota perempuan di posisi dewan serta melakukan perombakan struktur dewan pada perusahaan BUMN terutama di bidang perbankan guna memperbesar komposisi kepemimpinan wanita di perusahaan BUMN (Kementerian BUMN, 2020). Upaya menteri BUMN dalam menambah kuota kepemimpinan perempuan di perusahaan BUMN khususnya pada perbankan BUMN selaras dengan perkembangan penerapan *corporate governance*. Pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sehingga, tata kelola atau *corporate governance* adalah prosedur yang

sistematis untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan serta pemegang saham dengan tidak mengesampingkan kepentingan *stakeholder*.

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit merupakan komponen utama perusahaan hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan yang baik dapat dilahirkan oleh hasil kerja dan kebijakan yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing masing dewan tersebut (Fitroni & Feliana, 2022). Oleh karena itu komposisi dewan pada suatu perusahaan harus responsif terhadap fungsi dasar yang dibebankan padanya, yaitu mengawasi dan memantau perusahaan, menghindari perilaku oportunistik sebagai eksekutif, dan memberikan nasihat serta mengambil keputusan pada situasi yang kompleks (Putri et al., 2021). Menurut Fitroni & Feliana (2022), pelaksanaan tugas dan hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh masing masing dewan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat keragaman gender pada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun Komite Audit. Menurut Menurut Rompis et al. (2018), Ukuran dewan yang besar yang didalamnya terdapat keberagaman gender memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan bank karena keberagaman tersebut mampu memberikan pandangan baru yang lebih inovatif.

Nurwahyudi dan Mudasetia (2020) berpendapat tugas dewan direksi menentukan setiap kebijakan yang akan diambil perusahaan, keputusan yang diambil oleh wanita akan memakan waktu yang lama, hal ini dikarenakan wanita meneliti lebih dalam apa saja yang mungkin terjadi atas kebijakan tersebut sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak cepat dan akan berpengaruh negatif karena pada saat krisis dibutuhkan keputusan yang segera dalam mengatasinya. Akan tetapi, menurut Thoomaszen dan Hidayat (2020) sifat ketelitian yang dimiliki oleh wanita dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan wanita mampu menghindari resiko yang tinggi bagi perusahaan (Thoomaszen & Hidayat, 2020). Pernyataan ini didukung oleh pendapat Belaounia et al. (2020) yang menyatakan bahwa “*Generally, female directors enhance firm value because they possess valuable attributes that their male counterparts lack*”. Keragaman gender pada posisi dewan, ukuran dewan, ukuran perusahaan, dan rasio hutang secara simultan sangat berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan khususnya perbankan. Hal ini disebabkan oleh ukuran dewan yang besar dan memiliki keberagaman didalamnya mampu meningkatkan total asset perusahaan sehingga menurunkan rasio hutang perusahaan khususnya pada perbankan (Nurwahyudi & Mudasetia, 2020; Rompis et al., 2018).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linggih & Wiksuana (2018) menunjukkan bahwa keragaman gender dewan dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang baik namun rasio hutang berpengaruh buruk dan ukuran dewan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh *Return on Asset*. Keragaman gender dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Linggih & Wiksuana, 2018). Selain itu, keberadaan wanita pada posisi dewan mampu menurunkan konflik yang muncul antara manajemen dengan pihak pemilik perusahaan karena mampu menghasilkan insentif yang lebih banyak untuk mengontrol kinerja manajemen yang kemudian akan meningkatkan kinerja manajemen dalam memperoleh keuntungan untuk pemegang saham (Linggih & Wiksuana, 2018).

Berdasarkan penelitian Simionescu et al. (2021) kedudukan wanita di dewan perusahaan mempunyai pengaruh yang baik kepada kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh *Price Earning Ratio* (PER) tetapi tidak memiliki dampak yang besar terhadap ROA perusahaan. Kehadiran perempuan di posisi dewan dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan (Simionescu et al., 2021). Pernyataan ini diperkuat oleh Mastella et al (2021) bahwa kehadiran perempuan akan meningkatkan proses manajerial, keterampilan, dan inovasi serta mampu menambah perspektif baru dalam memecahkan masalah. Kemudian, ukuran perusahaan secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan (Simionescu et al., 2021). Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang kecil memiliki kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan berukuran besar dikarenakan perusahaan besar mampu menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi hutang perusahaan dengan melakukan negosiasi dan mengambil kesepakatan hutang yang lebih menguntungkan (Simionescu et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian kedua penelitian tersebut mengenai pengaruh

keberagaman gender terhadap kinerja perusahaan menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang serupa.

1.3. Perumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan kelima SDGs yaitu kesetaraan gender dan menciptakan *good corporate governance* di lingkungan BUMN, Erick Thohir selaku Menteri BUMN sedang membuka kuota kepemimpinan wanita dalam posisi komisaris dan direksi di perusahaan BUMN. Hal ini membuat persentase porsi perempuan yang menduduki posisi komisaris dan dewan meningkat. Persentase porsi perempuan yang menduduki posisi komisaris meningkat menjadi 8,65% dan porsi perempuan pada posisi dewan menjadi 10,28% di Tahun 2021 (Katadata Media Network, 2022). Akan tetapi, dibandingkan dengan negara lain, tingkat kedudukan wanita pada posisi eksekutif di Indonesia masih menjadi peringkat bawah. Hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia yang memposisikan kedudukan perempuan di bawah laki-laki dan terdapat penilaian bahwa perempuan akan memakan waktu yang lama dalam mengambil suatu keputusan namun di sisi lain perempuan juga memiliki ketelitian dan kepekaan yang tinggi sehingga mampu mengambil keputusan yang baik dapat menjadi penyeimbang kepemimpinan laki-laki. Berdasarkan pemaparan masalah pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh peningkatan komisaris dan dewan perempuan terhadap kinerja keuangan bank BUMN, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?
2. Bagaimana Pengaruh variabel control Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?
3. Bagaimana Pengaruh variabel control Rasio Hutang terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?
4. Bagaimana Pengaruh variabel control Ukuran Dewan terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?

5. Bagaimana Pengaruh Keberagaman Gender dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang, dan Ukuran Dewan terhadap kinerja keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?
6. Bagaimana Pengaruh variabel control Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang, dan Ukuran Dewan terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2015-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Pengaruh keberagaman gender terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021.
2. Pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021.
3. Pengaruh variabel kontrol rasio hutang terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021.
4. Pengaruh variabel kontrol ukuran dewan terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021.
5. Pengaruh keberagaman gender dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, rasio hutang, dan ukuran dewan terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021
6. Pengaruh variabel control ukuran perusahaan, rasio hutang, dan ukuran dewan terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015-2021

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian pengaruh *gender diversity* terhadap kinerja keuangan bank BUMN Tahun 2015 hingga 2021 diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat teoritis dan praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan pengembangan kemampuan mengenai seberapa jauh *gender diversity* memiliki pengaruh bagi kinerja keuangan perusahaan khususnya pada perbankan BUMN. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam pembahasan mengenai *gender diversity* dan *financial performance*.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan perusahaan dalam merealisasikan kesetaraan gender dan sebagai evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel / Situasi Sosial, Pengumpulan Data, dan Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian dan pembahasan diuraikan dan digambarkan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang hasil penelitian, dan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.